

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Kebutuhan lahiriah tersebut terdorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah, ini bersifat biologis. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang (Elis Adhayana, 2006: 12).

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputus begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi (Wantjik Saleh, 1976: 15).

Hukum Perkawinan yang berlaku menurut Undang-undang Perkawinan pertama-tama adalah Hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluknya. Bagi orang islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu Buddha seperti yang dijumpai di Indonesia (Hazairin, 1975: 5).

Namun perkawinan tidak semua berjalan sesuai dengan yang diharapkan, terkadang harus putus di tengah jalan apakah sebab perceraian itu karena cerai

talak, cerai gugat, fasid nikah, fasakh nikah, atau pembatalan sebuah perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena tidak dipenuhinya syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan yaitu tidak ada izin dari pihak ketiga. Dalam hukum islam, wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya, sebab sahnya nikah menurut Hukum Islam ditentukan antara lain adanya wali nikah. Wali nikah ini, bisa wali nasab atau wali hakim. Wali nasab itu pria yang beragama islam dan *akil baliqh* yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut Hukum Islam. Adapun wali hakim itu pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali (nasab). (Alhamdani, 1989: 88).

Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir (misal beragama Kristen/Katholik), atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim) (Alhamdani, 1989: 90).

Namun adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara'. Misalnya calon

suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka tidak dianggap alasan syar'i. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali '*adhol*. Makna '*adhol*, kata Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, adalah menghalangi seorang perempuan untuk menikahkannya jika perempuan itu telah menuntut nikah. Perbuatan ini adalah haram dan pelakunya (wali) adalah orang fasik.

Berkaitan dengan penelitian yang akan penulis dalami adalah mengenai bagaimanakah hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan baik menurut Undang-Undang maupun menurut Hukum Islam, pemohon Kasasi, Ir. Ismeth Hatta, M.Si Kepada Termohon Kasasi I, H. Sopian; Termohon Kasasi II, SR Reiyne Nur Youlla Iesmellia; dan Termohon Kasasi III, Kepala KUA Gambut Kabupaten Banjar.

Dalam perkara tersebut, sebagaimana mestinya perkara tersebut telah disidangkan dan diputuskan pada tingkat Pengadilan Agama Martapura yaitu Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2009/PA.Mtp tanggal 11 Nopember 2010, dengan amar putusan dalam pokok perkara, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan membatalkan perkawinan (pernikahan) antara Termohon I dengan Termohon II sebagaimana termaktub dalam akta nikah Nomor: 087/02/IV/2002 tanggal 3 April 2002 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Gambut;

3. Menetapkan akta nikah Nomor: 087/02/IV/2002 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Gambut tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan Gambut untuk mencoret akta nikah Nomor: 087/02/IV/2002 yang diterbitkan KUA Kecamatan Gambut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Selanjutnya dalam tingkat banding atas permohonan Termohon I dan Termohon II, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2011/PTA.Bjm tanggal 30 Juni 2011, yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 545/Pdt.G/2009/PA.Mtp, dan mengadili sendiri, dengan amar putusan dalam pokok perkaranya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon/ Terbanding I;
2. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama;
3. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Selanjutnya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor: 06 K/AG/2012 mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ir. Ismeth Hatta, M.Si;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara.

Dalam kasus ini, Majelis Hakim pada tingkat pertama mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Ir. Ismeth Hatta, M.Si,

sedangkan pada tingkat banding dan kasasi, Majelis Hakim Menolak permohonan pembatalan perkawinan tersebut sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Agama pada tingkat pertama.

Hukum acara yang berlaku di peradilan agama bersifat *lex specialis lex genaralis*, namun di samping itu juga Hukum Islam menjadi salah satu bahan pertimbangan hukum yang tidak boleh dinafi'kan oleh hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan hukum.

Berdasarkan hal inilah kemudian Peneliti berniat untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Putusan No: 06 K/AG/2012 Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai ringkasan duduk perkara, Mahkamah Agung RI telah membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan yang semula pada tingkat pertama permohonan pembatalan perkawinan dikabulkan, sedangkan pada tingkat banding dan kasasi dibatalkan sekaligus mengadili sendiri. Permohonan tersebut diajukan oleh Ayah kandung termohon yang merasa tidak pernah menikahkan anaknya atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menikahkannya.

Dari rumusan permasalahan di atas, maka pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim tingkat kasasi dalam memutuskan perkara permohonan pembatalan perkawinan atas putusan PA Nomor: 545/Pdt.G/2009/PA.Mtp ?

2. Bagaimana pertafsiran hakim tingkat lasasi terhadap asas unus testis nullus testis dalam putusan Nomor : 06 K/AG/2012 ?
3. Bagaimana penafsiran hakim terhadap asas unus testis nullus testis dalam perkara Nomor : 06 K/AG/2012 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum acara perdata dalam perkara pembatalan perkawinan.
3. Untuk mengetahui penafsiran hakim terhadap asas unus testis nullus testis dalam perkara Nomor : 06 K/AG/2012 ?

D. Kerangka Berpikir

Adapun yang menjadi kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah lebih difokuskan pada pembahasan isi keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 06/K/AG/2012. tentang pembatalan perkawinan.

Menurut Nur Rasaid tujuan diadakannya suatu proses pemeriksaan perkara di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Sedangkan Menurut Moh. Taufik Makarao putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berpekara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka

dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi (Ramdani Wahyu dan Burhanudin, 2013:8).

Putusan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum yang kongkret, yaitu perkara. Putusan juga merupakan wujud pengalihan dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat (Cik Hasan Bisri, 2003:46).

Adapun dalam proses pengambilan keputusannya, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini bertujuan memberikan peluang kepada hakim untuk melakukan ijtihad dalam proses pembentukan hukum baru dan membantu hakim dalam melakukan tugasnya, sehingga putusannya pun diharapkan akan sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat serta melahirkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al qada'u* yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini bisa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdicito contentiosa*.

Putusan peradilan perdata (peradilan agama adalah peradilan perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu atau menghukum sesuatu. Jadi *dictum vonnis* selalu bersifat *comdenatoir* artinya

menghukum atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan. Perintah dari pengadilan ini jika tidak diturut dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut eksekusi (Roihan A. Rasyid, 2002:193-194).

Kemudian menurut Cik Hasan Bisri berpendapat bahwa putusan merupakan produk pengadilan karena adanya dua pihak yang berlawanan, yaitu Penggugat dan Tergugat. Ia dikenal sebagai produk pengadilan yang sesungguhnya (*jurisdiction contentiosa*), ia memuat perintah pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu atau untuk menghukum sesuatu, amarnya bersifat menghukum (*condemnatoir*) atau bersifat menciptakan (*constitutoir*) dan putusan tersebut memiliki daya paksa untuk dilaksanakan atau dieksekusi (Cik Hasan Bisri, 2003:255).

Dari uraian di atas bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai penegak hukum yang melaksanakan pengadilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun

hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Ramdani Wahyu dan Burhanudin, 2013:8).

E. Langkah – Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum dengan subjek peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doctrinal, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum *in concreto*, sistem hukum dan sinkronisasi hukum. Metode pendekatan penelitian ini yang lebih tepat digunakan adalah metode penelitian analisis isi. Dalam metode penelitian analisis isi tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif. Artinya hukum bukan saja seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law In book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang

telah dipublikasikan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No: 06 K/AG/2012 .

- b. Bahan hukum sekunder yang bersumber pada pendapat para ahli hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti literatur hukum, Buku, makalah, kertas kerja, hasil seminar, jurnal dan bulletin hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Agung RI yang menangani perkara, salah satunya yaitu: Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. berupa rekaman audio dan catatan.

3. Jenis Data

Peneliti menyusun jenis data lebih rinci. Misalnya, dalam unsur analisis putusan dapat mencakup: pemilihan dan penentuan referensi (kitab fiqh) yang digunakan sebagai tujuan pembahasan, perbandingan dengan buku-buku tentang hukum acara peradilan agama di Indonesia (termasuk istilah yang digunakan), dan seterusnya. Rincian unsur fokus tersebut dijadikan bahan dalam penyusunan pertanyaan penelitian, baik yang di analisis dari putusan maupun pertanyaan kepada responden.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan putusan Mahkamah Agung RI, putusan Peradilan Agama, teks perundang-undangan dan buku-buku rujukan lainnya. Selain itu juga dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang berkaitan langsung dengan lahirnya putusan tersebut, dalam hal ini adalah Hakim Mahkamah Agung RI,

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengenai hal-hal apa yang dinyatakan oleh responden dalam wawancara baik secara lisan maupun tertulis. Lebih lanjut untuk menganalisis data yang diperoleh dipegunakan metode induktif (Soerjono Soekanto, 1984: 21), yakni berusaha mencari aturan-aturan, nilai-nilai maupun norma-norma hukum yang terdapat dalam pustaka yang terkait untuk dirumuskan sebagai suatu kaidah hukum tertentu yang bisa diberlakukan untuk menyelesaikan perkara-perkara di Peradilan Agama.

